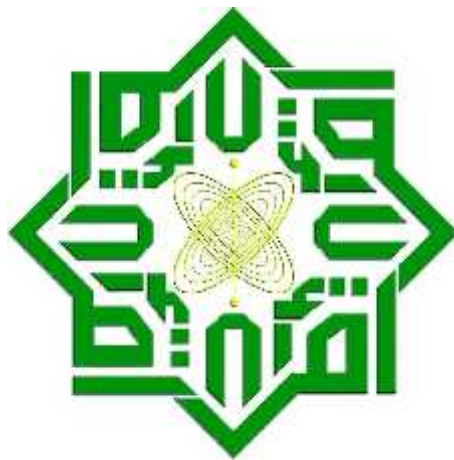


**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN
2010 TENTANG PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

ASEP SYAFRUDDIN

10827002683

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2013**

ABSTRAK

Wajib pajak sering lalai melakukan pembayaran, menghitung pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan atau tidak membayar sama sekali kewajibannya dengan berbagai alasan dan penolakan. Kondisi ini tidak hanya dilakukan oleh usaha rumah makan yang kecil, tetapi juga dilakukan oleh usaha rumah makan yang skalanya sudah besar, artinya sudah mempunyai omzet di atas rata-rata. Namun dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak sering lalai atau bahkan tidak membayar sama sekali. Di samping itu juga kurangnya pengawasan dan pendataan terhadap restoran atau rumah makan yang baru buka atau beroperasi, sehingga juga dapat mengurangi pemasukan kepada PAD.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis ingin melihat lebih jauh pelaksanaan Perda Nomor 24 Tahun 2010 tersebut, terhadap rumah makan yang ada di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan mengambil judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir”.

Dari latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir, bagaimanakah bentuk pelanggaran dalam pembayaran pajak restoran menurut Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 di Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2011, serta bagaimanakah penyelesaian terhadap pelanggaran dalam pembayaran pajak restoran menurut Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2011.

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis tentang Pemberlakuan Hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini antara lain adalah karena masih banyaknya restoran yang ada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak menghitung pajaknya secara bebas, sehingga yang dibayarkan tersebut tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, serta ada juga di antara restoran tersebut tidak melakukan pembayaran pajak.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan Perda Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan cara melakukan pemungutan pajak terhadap pemilik rumah makan atau restoran melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), sebesar 10% (sepuluh) persen dari pembayaran yang diterima oleh pemilik rumah makan, berdasarkan Pasal 6 Perda Nomor 24 Tahun 2010. Apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran maka dikenai denda sebesar 2% (dua) persen setiap bulan keterlambatan.

Pelanggaran dalam pembayaran pajak restoran di Kabupaten Indragiri Hilir, kebanyakan adalah terlambat atau lalai, di samping itu juga tidak mengisi formulir pembayaran pajak yang telah disampaikan oleh Dispenda. Oleh karena itu pihak Dispenda adakalanya melakukan penagihan langsung ke tempat wajib pajak melalui petugas yang ditunjuk, atau memerintahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran ke kantor pos terdekat atau langsung ke kas daerah pada Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir.

Penyelesaian terhadap pelanggaran pembayaran pajak restoran dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara memberikan surat teguran kepada wajib pajak, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib pajak harus segera melunasi pajak yang terhutang. Penyelesaian terhadap pembayaran pajak restoran ini lebih kepada memberikan kesempatan dengan memberikan tenggang waktu yang dijelaskan dalam Perda, sehingga tidak sampai kepada pemaksaan, dan lebih memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang terhutang tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Indragiri Hilir.....	19
B. Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir.....	21
C. Potensi Pajak (Restoran).....	24
D. Peran Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir dalam Bidang Pajak.....	26

BAB III : GAMBARAN TENTANG PAJAK

A. Pengertian Pajak.....	31
B. Objek Pajak.....	33
C. Fungsi Pajak.....	35
D. Macam-macam Pajak.....	36
E. Metode Pemungutan Pajak.....	38

F. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010.....	41
--	----

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Perda Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir.....	46
B. Pelanggaran dalam Pembayaran Pajak Restoran Menurut Perda Nomor 24 Tahun 2010.....	57
C. Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Pembayaran Pajak Restoran.....	64

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir..... 49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik begitu bunyi dari Pasal 1 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan pula bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.¹

Kepala daerah memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu kepada daerah diberi kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bertujuan untuk meningkatkan perkembangan pembangunan dan kemajuan daerah. Salah satunya adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan menggali potensi pendanaan melalui sektor pajak dan retribusi sebagai dana pembangunan yang dikenal dengan PAD.

Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Pendapatan Daerah memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni membantu

¹Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945

kepala daerah dalam rangka menjabarkan program kerja kepala daerah di bidang pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 157 dinyatakan, bahwa pendapatan asli daerah berupa:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Selanjutnya dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Selanjutnya Pasal 1 angka 22 disebutkan bahwa, Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga

²Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, pada Pasal 2 ayat (3) ditentukan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.³

Salah satu peraturan daerah yang mengatur tentang pajak adalah Perda Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Pada Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya, termasuk juga jasa boga/katering.

Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 menyebutkan bahwa:

³Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak

- (1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan, penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Dari ketentuan di atas jelas, bahwa subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Selanjutnya pihak pengusaha restoran menghitung pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Perda dan kemudian membayarkannya melalui tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Sebagaimana pelaksanaan pembayaran pajak restoran di Kabupaten Indragiri Hilir oleh wajib pajak (pemilik rumah makan), yang Dasar pengenaan pajak restoran dihitung berdasarkan besarnya jumlah yang diterima oleh pengelola restoran/rumah makan, dan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh) persen dari dasar pengenaan⁴.

Namun dalam kenyataannya di lapangan masih ada pemilik restoran yang melakukan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan yang ia peroleh, demikian juga halnya dengan waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perda, tetapi ada juga yang melewati waktu yang telah ditentukan.

Pajak merupakan kewajiban kepada pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

⁴ Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 Pasal 6 & 7 tentang Dasar Pengenaan dan tarif Pajak

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.⁵

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut dalam rangka untuk melakukan pemungutan terhadap pajak restoran, tentunya perlu dilihat lebih jauh pelaksanaannya di lapangan, karena pembayaran pajak lebih kepada kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya yang disebut dengan *self assessment*.

Self Assesment merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.⁶

⁵Uwon Gustiawan, *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h.13

⁶Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2004), h.98

Oleh karena itu tidak jarang terjadi bahwa wajib pajak tersebut lalai melakukan pembayaran, menghitung pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan atau tidak membayar sama sekali kewajibannya dengan berbagai alasan dan penolakan.

Kondisi ini tidak hanya dilakukan oleh usaha rumah makan yang kecil, tetapi juga dilakukan oleh usaha rumah makan yang skalanya sudah besar, artinya sudah mempunyai omzet di atas rata-rata. Namun dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak sering lalai atau bahkan tidak membayar sama sekali. Di samping itu juga kurangnya pengawasan dan pendataan terhadap restoran atau rumah makan yang baru buka atau beroperasi, sehingga juga dapat mengurangi pemasukan kepada PAD.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis ingin melihat lebih jauh pelaksanaan Perda Nomor 24 Tahun 2010 tersebut, terhadap rumah makan yang ada di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan mengambil judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”.

B. Batasan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang di atas, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang diteliti, agar tidak memberikan pengertian yang meluas bagi para pembaca atau peneliti selanjutnya. Adapun fokus penelitian ini adalah mencakup pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir, yang berhubungan dengan pembayaran

pajak restoran, pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, serta penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut, khusus mengenai pajak rumah makan pada Tahun 2011.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran dalam pembayaran pajak restoran menurut Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 di Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2011?
3. Bagaimanakah penyelesaian terhadap pelanggaran dalam pembayaran pajak restoran menurut Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2011?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir.

- b. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran dalam pembayaran pajak restoran menurut Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2010 tentang Pajak Rumah Makan Dan Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap pelanggaran dalam pembayaran pajak restoran menurut Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Rumah Makan Dan Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan tujuan dari penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam rangka mendalami ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. Di samping itu juga dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya dalam hal yang sama.
- b. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi para pengusaha rumah makan yang ada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Di samping itu juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang melaksanakan berbagai usaha untuk tidak lupa dengan kewajibannya. Juga bagi para aparatur pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Kerangka Teori

1. Negara Kesatuan

Indonesia sebagai negara hukum mendasarkan diri pada Undang-Undang Dasar 1945, dengan sendi negara kesatuan. Pada saat ini yang disebut Negara Kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Pusat.
- b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.⁷

Apabila dicermati bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, maka secara tekstual konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Ditinjau dari susunannya, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, seperti halnya negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal. Artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam negara. Dengan demikian, di dalam negara kesatuan itu hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang

⁷Syahda Guruh Langkah Samudera, *Menimbang Otonomi dan Federal*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.69

mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.⁸

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan tidak pada pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan otonomi daerah (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap pada pemerintahan pusat.⁹

Dengan merujuk kepada pendapat di atas, maka dalam konsep negara kesatuan sebenarnya selain mengenal pemerintah pusat yang dapat melakukan hubungan kedalam maupun keluar, juga mengakui keberadaan dari pemerintah daerah yang sifatnya bukan mendirikan negara dalam negara, tetapi keduanya dihubungkan dengan proses desentralisasi.

Ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No.32 Tahun 2004 menegaskan, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, adanya proses pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

daerah-daerah otonom dalam sistem desentralisasi tidak saja karena negara Indonesia menganut konsep negara kesatuan, tetapi undang-undang tentang Pemerintah Daerah juga menghendakinya.

Melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan dalam menata mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari pelbagai satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan “daerah” di sini adalah bagian dari wilayah Negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi, dialek (bahasa), tingkat pendidikan/pengajaran, dan sebagainya.¹⁰ Adapun model desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat berupa:¹¹

2. Peraturan Daerah

Proses pembentukan Peraturan Daerah, dimulai dengan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah (eksekutif) yang disertai dengan Naskah Akademis sebelum diajukan kepada DPRD (legislatif). Dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan, bahwa “Dalam

¹⁰Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.9

¹¹Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.30. Lihat juga Riant Nugroho D, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000), h.47

membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.¹²

Selanjutnya dalam Pasal 6 dijelaskan pula, bahwa “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantara;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.¹³

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun mengandung materi sebagai berikut:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

¹²Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹³*Ibid.*

d. Jangkauan dan arah pengaturan.¹⁴

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut diajukan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan perbaikan sesuai dengan asas dan tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tersebut, apabila telah mendapat persetujuan dari DPRD, maka Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diberlakukan sesuai dengan tujuannya.

3. Pendapatan Daerah

Penerimaan atau pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, lain-lain Pendapatan yang Sah, dan Penerimaan Pembiayaan.

a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- 1) Pendapatan pajak daerah
- 2) Pendapatan retribusi daerah
- 3) Pendapatan bagian laba BUMD dan investasi lainnya
- 4) Pendapatan asli daerah lain-lain

b. Pendapatan Dana Perimbangan, terdiri dari:

- 1) Pendapatan bagian daerah dari PBB dan BPHTB
- 2) Pendapatan daerah dari pajak penghasilan
- 3) Pendapatan bagian daerah dari SDA
- 4) Dana alokasi umum
- 5) Dana alokasi khusus.

c. Lain-lain pendapatan yang sah, terdiri dari:

- 1) Pendapatan hibah

¹⁴*Ibid.*

- 2) Pendapatan dana darurat
- 3) Pendapatan lain-lain
- d. Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari:
 - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran
 - 2) Penjualan aset daerah yang dipisahkan
 - 3) Penjualan investasi lainnya
 - 4) Pinjaman luar negeri
 - 5) Pinjaman dari pemerintah pusat
 - 6) Pinjaman dari daerah otonom lainnya
 - 7) Pinjaman dari BUMN
 - 8) Pinjaman dari BUMD
 - 9) Pinjaman dari Bank
 - 10) Pinjaman dari lembaga keuangan
 - 11) Pinjaman dari lembaga keuangan lainnya.¹⁵

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas dapat dilihat bahwa salah satu pendapatan asli daerah kabupaten adalah pajak daerah, di antaranya adalah pajak restoran atau rumah makan, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵Atep Adya Brata dan Bambang Trihartanto, *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), h.56

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis tentang Pemberlakuan Hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini antara lain adalah karena masih banyaknya restoran yang ada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak menghitung pajaknya secara bebas, sehingga yang dibayarkan tersebut tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, serta ada juga di antara restoran tersebut tidak melakukan pembayaran pajak.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah rumah makan yang ada di kota Tembilahan, yang berjumlah 30 buah pada Tahun 2011. Oleh karena jumlahnya cukup besar maka penulis mengambil sampel 15%, yakni 5 buah rumah makan, dengan pemilik sebanyak 5 orang. Kemudian ditambah dengan staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 3 orang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kuesioner pada data primer yang meliputi:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden. Pengumpulan data ini dilakukan untuk menemukan data yang akurat mengenai pelaksanaan Perda Nomor 24 Tahun 2010, pelanggaran dalam pembayaran pajak restoran, serta penyelesaian terhadap pelanggaran dalam pembayaran pajak restoran menurut Perda Nomor 24 Tahun 2010.
- b. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa dokumen atau laporan-laporan mengenai pembayaran pajak oleh pelaku bisnis rumah makan, serta struktur dan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan perkembangan Kabupaten Indragiri Hilir, buku, jurnal dan lain-lain.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung gejala dan fenomena yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu penulis bertanya langsung kepada para pihak yang terkait.
- c. Studi pustaka, yaitu penelaahan secara mendalam berbagai penulisan para ahli di bidang hukum.

6. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data dalam tulisan ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, artinya menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Penulis dalam melakukan pembahasan juga menghubungkan antara data yang diperoleh di lapangan dengan teori atau pendapat para ahli agar mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, kemudian mengambil kesimpulan dengan metode deduktif, yakni menjelaskan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis memberikan gambaran melalui sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, konsep teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari gambaran tentang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir, Potensi Pajak (Restoran), dan Peran Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir dalam Bidang Pajak.

Bab III menggambarkan tentang Pengertian Pajak, Metode Pemungutan Pajak, dan Macam-macam Pajak Daerah.

Bab IV berisi penyajian data dan hasil penelitian, yang berisi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010, pelanggaran dalam pembayaran pajak restoran, serta penyelesaian terhadap pelanggaran pembayaran pajak restoran menurut Perda Nomor 24 Tahun 2010 di Kabupaten Indragiri Hilir.

Bab V merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir Resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965, tanggal 14 Juni 1965 (LN. RI No.49). daerah ini terletak di bagian selatan Propinsi Riau dengan luas wilayah 11.605,97 Km². Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan, sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Propinsi Jambi), sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu, dan sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Propinsi Kepri).¹⁶

Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit dengan menggunakan kendaraan speed boat, pompong, dan perahu. Di antara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berasal dari Danau Singkarak (Propinsi Sumatera Barat) yang bermuara di Selat Berhala.

Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada daratan rendah atau daerah pesisir timur dengan ketinggian lebih kurang 500 meter dari permukaan laut. Hal ini mengakibatkan daerah ini menjadi daerah rawa-rawa yang beriklim tropis basah.

¹⁶Badan Pusat Statistik Kab.Indragiri Hilir, *Indragiri Hilir dalam Angka*, 2011, h.3

Akan tetapi, terdapat beberapa desa yang merupakan dataran tinggi. Desa-desa tersebut terdapat di Kecamatan Keritang dan Kemuning. Hal ini menyebabkan lahan pertanian pada daerah tersebut tidak terpengaruh kepada air laut.

Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibukotanya Tembilahan. Pada Tahun 2005 Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah ini terdiri dari 20 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 174 Desa. Secara administrasi Kabupaten Indragiri Hilir dikepalai oleh seorang Bupati dan seorang Wakil Bupati. Di dalam melaksanakan tugasnya ada 3 (tiga) organisasi perangkat staf pemerintahan daerah, yaitu Sekretariat Daerah (Setda), Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengawas.¹⁷

Sekretaris Daerah membawahi 3 (tiga) asisten, yaitu Asisten Praja (I), Asisten Ekonomi dan Pembangunan (II), dan Asisten Administrasi (III). Masing-masing asisten juga membawahi beberapa bagian dan seterusnya sesuai dengan Struktur dan Organisasi Tata Kerja (SOT).

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2010 berjumlah 662.305 jiwa, rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Tembilahan, yaitu 62.524 jiwa, dan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Sungai Batang, yaitu 11.826 jiwa.

Dilihat dari komposisinya, bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 340.299 jiwa,

¹⁷*Ibid.*

sedangkan penduduk perempuan berjumlah 322.006 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 57 jiwa per Km², kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tembilahan dengan tingkat kepadatan 352 jiwa per Km², sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Batang Tuaka dengan tingkat kepadatan 25 jiwa per Km².¹⁸

B. Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dan amanat pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah menjadikan : "**INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025**"

Keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan wilayahnya yang memiliki kekhasan sebagai wilayah pasang surut dan bergambut, menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju, dan terbuka adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan marginal telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjadikan bagi masa depan daerah dan masyarakat yang setara dengan daerah-daerah lainnya yang sifat lahan wilayahnya jauh lebih berpotensi. Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin dari pada tingkat pendapatan dan

¹⁸ *Ibid.* h.41

distribusinya dalam masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat dan semakin meratanya distribusinya pendapatan tersebut dalam masyarakat, maka akan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka akan ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan daya saing daerah : adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainable) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.
2. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan konsitusi negara dalam koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat dan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasana kehidupan yang menjunjung hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, serta tidak diskriminatif.

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya : adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesibilitas di seluruh wilayah, dan menjangkau ke seluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.
4. Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya : adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan politik sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara bersama yakni melayu maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera.
5. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional nasional dan internasional : adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional nasional dan internasional sehingga perlu semakin dimantapkan infentitas dan

integrasi yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat indragiri hilir, mendorong meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional.¹⁹

Visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir pada hakekatnya mengacu kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan cara memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah.

C. Potensi Pajak (Restoran)

Dilihat dari perkembangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, terutama di Ibukota Kabupaten Tembilahan, sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, baik penduduk tempatan maupun pendatang, sudah jelas berbagai bidang usaha dapat tumbuh dan berkembang, termasuk di antaranya adalah usaha atau bisnis restoran atau rumah makan.

Bisnis restoran atau rumah makan senantiasa terus berkembang dan meningkat pada setiap tahun, berbagai macam bentuk dan jenis usaha restoran bermunculan di Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan. Hal ini jelas merupakan potensi yang cukup besar terhadap pendapat asli daerah yakni pada sektor pajak restoran.

Penerimaan pajak pada sektor restoran atau rumah makan memang menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Hal ini didukung oleh

¹⁹*Ibid.*

perkembangan yang terjadi di daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ini dapat menambah angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sektor pajak.

Sebagai sebuah daerah yang kaya akan sumberdaya alam, dan menyimpan berbagai potensi ekonomi, Kabupaten Indragiri Hilir menjanjikan banyak kemungkinan dimasa depan. Didukung letak geografis yang strategis, serta ditunjang tersedianya berbagai infrastruktur dan kebijakan Pemerintah dalam pembangunan, daerah ini merupakan daerah investasi yang layak diperhitungkan dalam era ekonomi global. Untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan mempermudah investasi, Pemerintah Daerah telah membangun berbagai infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi untuk mempermudah akses dari dan keluar Kabupaten Indragiri Hilir, baik melalui jalur darat, laut maupun udara, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif yang mempermudah sektor swasta untuk menjadi pelaku bisnis di daerah ini.

Di antaranya adalah bisnis kuliner, yakni berupa rumah makan atau restoran yang terus menunjukkan peningkatan, baik dari segi jumlah maupun banyaknya jenis makanan dan minuman yang ditawarkan oleh pemilik restoran atau rumah makan. Kondisi ini sudah pasti menambah pemasukan daerah dari sektor pajak restoran.

D. Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Bidang Pajak

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang membantu tugas-tugas Bupati dalam bidang pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok untuk menjabarkan program kerja dalam rangka meningkatkan pendapat daerah pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Indragiri Hilir diharapkan mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan untuk mampu menjadi motor penggerak perangkat daerah dalam penyediaan dana untuk pembangunan daerah.

Untuk lebih mengoptimalkan keikutsertaan dinas-dinas teknis dalam mengaplikasikan program-program yang menjadi prioritas daerah, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan amanat kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pendapatan daerah.

Sebagai perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berperan dalam:

- a. Mengkoordinasikan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi lain, guna kelancaran pelaksanaan tugas.

- b. Membina yang merupakan segala usaha dan kegiatan pendidikan dan latihan serta bimbingan ke arah peningkatan kemampuan teknis pelaksanaan tugas.
- c. Merumuskan kebijakan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan dalam penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pemungutan, pengawasan/pemantauan, pengembangan, dan pengkajian serta pengendalian potensi penerimaan daerah.
- d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran, pendataan dan penetapan objek dan subjek pajak/retribusi daerah, melalui penetapan surat pajak/retribusi daerah yang terhutang serta besarnya angsuran wajib pajak.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi objek dan subjek pajak/retribusi daerah, perhitungan realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pengarsipan surat-surat perpajakan daerah.
- f. Merumuskan dan melaksanakan, pengembangan, pengawasan dan pemeriksaan lokasi penetapan objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
- g. Merumuskan dan melaksanakan penagihan pajak/retribusi daerah, pembinaan pembukuan dan verifikasi, serta memberikan pertimbangan atas permohonan keberatan terhadap penetapan/retribusi daerah.
- h. Merumuskan dan melaksanakan peñatausahaan atas objek dan subjek pajak, penerimaan retribusi, penerimaan BUMD, penerimaan bagi hasil pajak dan

bukan pajak, penerimaan pendapatan lain-lain, dan surat-surat berharga serta legalisasinya.²⁰

Sebagai pemberian pelayanan umum di bidang pendapatan daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah Indragiri Hilir berperan dalam:

- a. Mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan kebijakan teknis pemberian pelayanan umum sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan.
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan, pendistribusian dan penagihan tunggakan pendapatan daerah.
- c. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan keberatan dan permohonan banding atas penetapan pajak/retribusi daerah.
- d. Merumuskan dan melaksanakan pencatatan, perhitungan dan pemindahbukuan pembayaran retribusi.
- e. Merumuskan dan melaksanakan peyampaian dan penerimaan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak.

Selanjutnya sebagai pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, berperan dalam:

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan.

²⁰Ekspos Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 2011

- b. Membina pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
- c. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan keuangan, serta administrasi kepegawaian.
- d. Merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, protocol, kearsipan, keuangan dan kepegawaian.²¹

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut:

Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Sub Dinas Program, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kebijakan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan serta pengendalian potensi pendapatan daerah.

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak/retribusi daerah, serta pendataan objek pajak/retribusi daerah, melaksanakan perhitungan dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak.

²¹*ibid.*

Sub Dinas Penagihan, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penagihan pajak/retribusi daerah yang telah lewat waktu jatuh tempo, melakukan pembukuan dan verifikasi, melayani keberatan dan permohonan banding serta memberikan pertimbangan atas permohonan keberatan terhadap pendapatan/retribusi daerah.

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain serta penerimaan badan usaha milik daerah, melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan pembukuan dan pelaporan mengenai penerimaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak, serta mempelajari peraturan perundang-undangan dan pengkajian sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan potensi daerah.

BAB III

GAMBARAN TENTANG PAJAK

A. Pengertian Pajak

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pajak merupakan pemasukan bagi Negara yang terbesar demikian juga halnya dengan daerah. Sejak dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi daerah, maka daerah saat ini senantiasa berpacu untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya adalah pada sektor pajak yang macamnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, bahwa “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
- 4) Lain-lain PAD yang Sah.²²

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pendapatan asli daerah adalah di sektor pajak daerah, yang pengaturan melalui undang-undang, dan dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Daerah. Penghasilan daerah melalui sektor pajak merupakan sektor yang paling dominan

²²Fokusmedia, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, (Bandung, 2004), h.110

untuk menopang pembangunan daerah, untuk itu dalam penggunaannya senantiasa diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga Negara di samping hak-hak yang juga harus diperolehnya. Adapun hak-hak yang melekat pada manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Di samping hak-hak asasi manusia tersebut terdapat juga kewajiban-kewajiban asasi, yaitu kewajiban-kewajiban yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti kewajiban untuk tunduk kepada peraturan perundang-undangan, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidup dan sebagainya.²³

Di antara kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara Indonesia adalah taat dan patuh dengan ketentuan membayar pajak, yang berhubungan dengan harta benda yang dimiliki, seperti PBB, pajak kendaraan, pajak penghasilan dan sebagainya. Pajak yang dibayarkan tersebut juga akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, berupa

²³Kartasapoetra, *Sistimatika Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h.246

pembangunan fasilitas umum, sarana prasarana dan sebagainya, oleh karena itu pajak juga disebut dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Hukum pajak juga sering disebut sebagai Hukum Fiskal, yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan meyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga memperoleh bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).²⁴

Dengan adanya dua hak yang bergandengan tersebut, maka seseorang tidak hanya menuntut hak saja, namun sebaliknya ia juga harus melaksanakan kewajiban. Hal ini dilakukan untuk terjadinya keseimbangan antara dua hak yang melekat dalam diri seseorang.

B. Objek Pajak

Adapun objek pajak dan retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Adapun jasa tertentu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan tertentu.²⁵

²⁴S.F.Marbun dan Moh.Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.130

²⁵Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.56

1. Pajak dan Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Jasa Umum adalah pajak atau retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Pajak dan Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut konsep komersial, yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

3. Pajak dan Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas. Adapun jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Izin peruntukkan penggunaan tanah.
- b. Izin mendirikan bangunan.
- c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- d. Izin gangguan.
- e. Izin trayek.

Kesemua jenis pajak dan retribusi tersebut adalah merupakan pendapatan asli daerah, yang dapat menopang pembangunan daerah dalam berbagai sektor. Oleh karena itu pungutan pajak dan retribusi yang dilakukan merupakan bentuk dari perhatian masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan di daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah, dalam berbagai aspek dan sektor pembangunan.

C. Fungsi Pajak

Dalam hubungannya dengan fungsi mengatur (*regulerend*), maka pajak daerah berfungsi untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah daerah. Dalam fungsinya yang mengatur, maka pajak daerah merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Ada beberapa penerapan fungsi mengatur dari pajak, antara lain adalah:

1. Pemberlakuan tarif progresif, dengan pengertian bahwa pajak juga dikenal sebagai alat dalam redistribusi pendapatan.
2. Pemberlakuan bea masuk yang tinggi, dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri, sehingga mendorong pertumbuhan industri lokal.
3. Pemberian fasilitas keringanan pajak untuk industri tertentu, untuk memberi motivasi kepada para investor dalam menanamkan investasinya.
4. Pengenaan pajak untuk barang-barang mewah untuk membatasi gaya hidup mewah.²⁶

D. Macam-Macam Pajak Daerah

Pajak daerah sebenarnya merupakan Pendapatan Daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Dana Perimbangan.
- c. Lain-lain Pendapatan.

Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.

²⁶Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004), h.39

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah tersebut jenisnya sama, baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah.

Fungsi mengatur dari pajak tersebut di atas adalah dalam skala nasional, dalam upaya untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat secara umum. Namun dalam skala daerah, maka pajak daerah Propinsi dan daerah Kabupaten / Kota tersebut dapat berupa:

- a. Pajak kendaraan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak hotel dan restoran.
- e. Pajak hiburan.
- f. Pajak reklame.
- g. Pajak penerangan jalan.
- h. Pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C.
- i. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.²⁷

Jenis-jenis pajak daerah tersebut merupakan pendapatan asli daerah dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pajak-pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak tersebut di samping fungsi finansialnya, juga berfungsi

²⁷*Ibid*, h.35

mengatur, artinya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat daerah, di antaranya adalah dengan cara mengatur penggunaan pajak-pajak daerah tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.

Adapun penggunaan pajak daerah tersebut secara tidak langsung juga dikembalikan lagi kepada masyarakat, dalam wujud pembangunan, baik yang berupa fasilitas umum maupun dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk bantuan sosial kemasyarakatan dan sebagainya.

Fungsi mengatur pajak daerah juga diwujudkan dalam bentuk memberi perhatian kepada masyarakat miskin, anak telantar, anak-anak putus sekolah dan sebagainya. Juga dapat memberi perhatian terhadap pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu dan sebagainya.

E. Metode Pemungutan Pajak

Pajak merupakan pungutan dengan sifat khusus, yaitu tanpa adanya jasa timbal secara langsung. Hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak tidak bersifat timbal balik, karena pemerintah hanya mempunyai hak saja, yaitu hak untuk memungut pajak. Sedangkan sebaliknya wajib pajak hanya mempunyai kewajiban saja, yaitu kewajiban untuk membayar pajak.²⁸

Adapun ciri khusus dari pajak adalah bahwa terhadap pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal secara langsung. Artinya jasa timbal

²⁸Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004), h.22

dari pemerintah ada tetapi tidak secara langsung ditujukan kepada wajib pajak yang bersangkutan, dan jasa timbalnya biasanya ditujukan untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan umum. Misalnya diwujudkan dalam bentuk pembangunan jalan, bangunan atau fasilitas umum, maupun sarana lain yang semuanya ditujukan untuk kepentingan umum.

Demikian juga halnya dengan pajak daerah, yang dipungut oleh pemerintah daerah atau instansi terkait yang ada di daerah dalam rangka untuk menunjang pembangunan di daerah.

Di samping pajak daerah, juga terdapat retribusi daerah yang merupakan pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk menunjang pembangunan daerah. Dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah sering digandengkan karena merupakan pemasukan daerah dari berbagai aspek dan sektor pungutan.

Pajak dan retribusi daerah adalah pungutan yang dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanan. Sejalan dengan pengertian Pajak daerah, maka penerimaan yang diperoleh penguasa publik dari rumah tangga swasta, berdasarkan norma-norma umum yang diterapkan, berhubungan dengan prestasi-prestasi yang diselenggarakan atas usul dan kepentingan Rumah Tangga Swasta dan prestasi tersebut berhubungan dengan kepentingan umum, secara khusus dilaksanakan sendiri oleh pengawas publik.

Pajak daerah dan retribusi daerah juga merupakan pungutan daerah sebagai imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung

oleh seseorang atau badan atas jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang atau izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Dari pengertian di atas, maka pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, hal ini tergantung dari besar kecilnya jasa layanan yang diberikan oleh daerah yang bersangkutan. Pajak dan Retribusi juga suatu pembayaran dari rakyat kepada Negara dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara kelas jasa yang secara langsung diterima dengan adanya pembayaran itu.²⁹

Dari kedua definisi di atas, tampak bahwa pajak dan retribusi sebenarnya merupakan imbalan atas jasa yang diterima dari negara atau daerah. Lebih jelasnya Manulang mendefinisikan Retribusi Daerah, adalah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari definisi di atas jelas bahwa tujuan dari pungutan pajak dan retribusi daerah bukannya mencari keuntungan, karena dari hasil pungutan tersebut yang diutamakan adalah pemeliharaan atas kelangsungan pekerjaan, serta untuk pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat. Oleh karena itu pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat.

²⁹Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1985), h.44

F. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pajak Restoran.

Mengingat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, maka dilakukan perubahan terhadap aturan mengenai Pajak Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Adapun yang

dimaksud dengan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.³⁰

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sedangkan tahun pajak adalah jangka waktu paling lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran berisi tentang:

Bab I Ketentuan Umum, berisi mengenai pengertian-pengertian, yang tercantum dalam Pasal 1. Pengertian disini menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan isi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011.

Bab II Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak, yang dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Pada bab ini dijelaskan mengenai

³⁰Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

nama Peraturan Daerah, objek yang dimaksud, subjek yang dikenai, pihak-pihak yang wajib melakukan pembayaran pajak.

Bab III Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak, yang dijelaskan dalam pasal 6. Pada bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengenaan pajak dan besarnya tariff pajak.

Bab IV Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, Perhitungan dan Saat Pajak Terhutang, yang dijelaskan dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9. Pada bab ini diuraikan mengenai cakupan wilayah pemungutan pajak, tenggang waktu pembayaran pajak, perhitungan pajak, dan kapan masanya pajak yang terhutang.

Bab V Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak, dijelaskan dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Pada bab ini dijelaskan mengenai penghitungan pajak, serta cara-cara penetapan pajak.

Bab VI Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak, dijelaskan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20. Bab ini memberi penjelasan tentang tata cara pembayaran pajak, serta tata cara penagihan pajak yang terhutang.

Bab VII Keberatan dan Banding, dijelaskan dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Pada bab ini dijelaskan mengenai pengajuan keberatan dan pengajuan banding oleh wajib pajak.

Bab VIII Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, dijelaskan dalam Pasal 25,

Pasal. Bab ini menjelaskan mengenai tata cara koreksi terhadap pajak terhutang, pembatalan perhitungan pajak, pengurangan terhadap kesalahan perhitungan, serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi terhadap wajib pajak.

Bab IX Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dijelaskan dalam Pasal 26 dan Pasal 27. Bab ini menjelaskan mengenai kelebihan pembayaran pajak terhutang.

Bab X Kadaluwarsa Penagihan, dijelaskan dalam Pasal 28 dan Pasal 29. Bab ini menjelaskan mengenai lewat waktu masa penagihan.

Bab XI Pembukuan dan Pemeriksaan, dijelaskan dalam Pasal 30 dan Pasal 31. Bab ini menjelaskan mengenai pembukuan pajak dan pemeriksaan terhadap pembukuan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Bab XII Insentif Pemungutan, dijelaskan dalam Pasal 32. Bab ini mengatur mengenai insentif atau honor yang diberikan kepada staf pemungut pajak.

Bab XIII Penyidikan, dijelaskan dalam Pasal 33. Bab ini mengatur masalah penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Bab XIV Ketentuan Pidana, dijelaskan dalam Pasal 34 dan Pasal 35. Bab ini mengatur tentang jenis sanksi dan lama atau besarnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

Bab XV Ketentuan Peralihan, dijelaskan dalam Pasal 36. Bab ini mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan status Perda.

Bab XVI Ketentuan Penutup, dijelaskan dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39.

Bab ini mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pemberlakuan Perda.

Gambaran di atas merupakan sistematika dari Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Perda Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir

Pemerintah daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia merupakan daerah otonom yang diberi amanat oleh undang-undang untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, termasuk dalam mengelola keuangan dan menambah pendapatan asli daerah dari berbagai aspek yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di antara dinas daerah yang diberi kewenangan otonom adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam pelaksanaan tugasnya berupaya untuk menggali sumber daya yang ada di daerah, diantaranya adalah melakukan pemungutan terhadap Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010.

Dalam melakukan pemungutan terhadap Pajak Restoran tentunya melalui aturan atau pelaksanaan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Oleh karena itu dalam pemungutan pajak restoran tersebut tentunya berhubungan dengan berbagai kegiatan dan berhubungan dengan wajib pajak. Dalam melakukan pemungutan juga harus berdasarkan perhitungan yang sudah ditentukan oleh peraturan daerah tersebut. Bagi wajib pajak tentunya

menginginkan pajak yang dibayarkan tidak terlalu memberatkan bagi mereka, karena harus diperhitungkan sesuai dengan pemasukan yang diperoleh.

Dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2010 tentang Pajak Restoran dijelaskan, bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Selanjutnya yang disebut Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kantin, warung dan sejenisnya.

Pajak Restoran dipungut terhadap orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pohan Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang mengatakan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.³¹

Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.³² Sehubungan dengan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa pajak restoran muncul karena adanya usaha penyedia makanan dan minuman, dan adanya transaksi antara penyedia makanan dengan pembeli, dengan menempati gedung atau tempat yang menurut peraturan daerah harus dikenai pajak dalam rangka untuk menambah pendapatan asli daerah.

³¹Pohan (Kabid Pendataan pada Dispenda Kab.Indragiri Hilir), *Wawancara*, 25 Januari 2013

³²Pasal 3 Peraturan Daerah Kab.Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh pihak restoran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh M.Ruis salah seorang staf bidang pajak pada Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir yang mengatakan, bahwa pengenaan pajak restoran dihitung berdasarkan besarnya jumlah pembayaran yang diterima oleh pengelola restoran, dan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh) persen dari dasar pengenaan tersebut.³³

Berkenaan dengan hal tersebut maka pihak pengelola restoran harus melakukan penambahan pembayaran terhadap pembeli sebesar 10% (sepuluh) persen dari jumlah yang dibayarkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali Uma pemilik Rumah Makan Simpang Tiga mengatakan, bahwa setiap pembeli dikenakan pajak 10% (sepuluh) persen dari jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli tersebut, hal ini berdasarkan ketentuan yang diterima dari Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir.³⁴

Adapun mengenai data pembayaran pajak 5 (lima) restoran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³³M. Ruis (Staf Bidang Pajak pada Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir), *Wawancara*, 25 Januari 2013. Dijelaskan pula dalam Pasal 6 Perda Nomor 24 Tahun 2010

³⁴Ali Uma (pemilik Rumah Makan Simpang Tiga), *Wawancara*, 19 Januari 2013

Tabel IV.1

Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Wajib Pajak	Jumlah	Keterangan
1	RM. C.F.C	Rp.21.962.100,-	Lunas
2	RM. Simpang Tiga	Rp.12.079.746,-	Lunas
3	RM. Purworejo	Rp.11.241.720,-	Menunggak
4	RM. Pemuda Semarang	Rp.10.345.750,-	Menunggak
5	RM. Friska	Rp. 845.000,-	Menunggak
	Jumlah	Rp.56.474.316,-	

Sumber: Data lapangan, 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tagihan pajak yang disampaikan kepada masing-masing rumah makan memang sudah diterima dan disetujui, namun dalam realisasinya belum dapat ditagih secara keseluruhan, karena masih ada yang belum membayar (menunggak).

Data yang diperoleh di lapangan dalam Tahun 2011 terdapat 3 (tiga) buah restoran yang menunggak dalam melakukan pembayaran pajak. Sedangkan yang lainnya melakukan pembayaran sesuai dengan surat perintah pembayaran pajak dari Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari segi makro ekonomi, bahwa pajak merupakan penghasilan bagi negara atau daerah, tanpa menimbulkan kewajiban bagi negara atau daerah secara langsung terhadap wajib pajak. Dimana hasil pungutan pajak tersebut digunakan

untuk membiayai pengeluaran negara atau daerah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Pengeluaran rutin ditujukan untuk kelangsungan hidup negara. Sedangkan pengeluaran pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat.³⁵

Dari pernyataan di atas jelas bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah merupakan pemasukan ke dalam kas daerah untuk pembangunan dan untuk mensejahterakan masyarakat, melalui pembangunan fasilitas umum, bantuan sosial dan sebagainya.

Dalam hal pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, maka setiap wajib pajak yang memiliki restoran atau rumah makan harus membayar pajak yang terutang dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD, yang harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.³⁶

Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Mina pemilik Rumah Makan Frisca yang mengatakan, bahwa pembayaran pajak restoran yang dilakukannya adalah berdasarkan surat yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah, yang diisi oleh wajib pajak berdasarkan pajak yang terutang, artinya berdasarkan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan dibebani

³⁵ Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004), h.16

³⁶ Pasal 11 Perda Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

10% (sepuluh) persen pajak, berdasarkan jumlah tersebut maka pajak harus dibayarkan oleh wajib pajak atau pemilik restoran.³⁷

Demikian juga halnya yang diungkapkan oleh Dedi Staf UPT Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir yang mengatakan, bahwa para wajib pajak melakukan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan kepada wajib pajak oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.³⁸

Sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas, maka wajib pajak harus senantiasa menghitung pajak yang harus dibayarkannya sesuai dengan kenyataan yang terjadi, tanpa ada rekayasa atau penipuan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Pohan Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa wajib pajak mengisi sendiri kewajiban pajak yang harus dibayarkannya, sesuai dengan asas yang tercantum dalam perpajakan bahwa wajib pajak mengisi sendiri pajak yang akan dibayarkannya.³⁹

Hal ini sesuai dengan sistem pemungutan pajak, yakni *self assesment system* yaitu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak

³⁷Mina (pemilik Rumah Makan Frisca), *Wawancara*, 19 Januari 2013

³⁸Dedi (Staf UPT Dispenda), *Wawancara*, 25 Januari 2013

³⁹Pohan (Kabid.Pendataan pada Dispenda Inhil), *Wawancara*, 25 Januari 2013

dalam hal ini yang aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.⁴⁰

Sehubungan dengan pembayaran pajak restoran oleh wajib pajak, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010, maka pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Bupati, dan sesuai pula dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD.⁴¹

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suyanto pemilik Rumah Makan Purworejo mengatakan, bahwa ia melakukan pembayaran pajak di Kantor Pos dengan mengisi surat yang diberikan oleh pihak Dispenda, yang diisi berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Dispenda yakni 10% (sepuluh) persen dari setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli.⁴²

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak harus sekaligus dan lunas sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak daerah yang diisi oleh wajib pajak.⁴³ Oleh karena itu maka wajib pajak melakukan pembayaran pada tempat yang telah ditentukan oleh keputusan Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dapat dilakukan pada kas daerah, dan dapat pula dilakukan pada kantor pos terdekat. Setiap pembayaran

⁴⁰ Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004), h.98

⁴¹ Pasal 13 Perda Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

⁴² Suyanto (pemilik Rumah Makan Purworejo), *Wawancara*, 19 Januari 2013

⁴³ Pasal 14 ayat (1) Perda Kab.Inhil Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

maka wajib pajak mendapatkan surat tanda bukti pembayaran dari tempat pembayaran yang bersangkutan.

Di samping sebagai budgeter pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai regulerend. Dengan fungsi budgeter pajak terletak di sektor publik dan merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya pada kas negara, yang kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang (di Indonesia) pada umumnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin. Sedangkan fungsi regulerend (mengatur) berarti bahwa pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi dan banyak ditujukan pada sektor swasta.⁴⁴

Demikian juga halnya dengan pajak daerah, sebagaimana yang dijelaskan di atas juga mempunyai fungsi mengatur, terhadap hal-hal tertentu dalam rangka pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam implementasinya tidak semudah apa yang diungkapkan, tentunya dalam rangka melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah masih menemui kendala atau hambatan antara lain sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak

Pajak dilihat dari segi hukum dapat diartikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang, yang mewajibkan seseorang yang memenuhi

⁴⁴R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1988), h.182

syarat yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada pemerintah, dengan tiada mendapat imbalan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.⁴⁵

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Dari pengertian di atas, memang kewajiban membayar pajak tersebut dibebankan kepada seseorang atau badan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaannya pembayaran pajak tersebut lebih ditekankan kepada kesadaran bagi wajib pajak untuk membayar pajak, termasuk pajak daerah.

Apabila dilihat dalam kenyataannya, maka masih banyak para wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, di sini terlihat bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang dibebankan kepadanya.

Masyarakat belum memahami benar akan arti dan pentingnya membayar pajak, karena pajak tersebut adalah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tanpa disadari bahwa pajak yang telah dibayarkan tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat, dalam bentuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁴⁵Y.Sri Pudyatmoko, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002), h.13

⁴⁶Fidel, *Konsultan Pajak dan Wajib Pajak*, (Jakarta: Amparo's Publishing, 2007), h.65

2. Kurang Transparan atau Keterbukaan bagi Wajib Pajak

Sehubungan dengan kewajiban membayar pajak, maka kepada masyarakat undang-undang memberikan kebebasan untuk menghitung sendiri beban pajak yang akan dibayarkannya sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam kenyataannya bahwa wajib pajak sering tidak berlaku jujur terhadap kewajiban yang harus dilakukannya, artinya pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan kewajiban yang harus dibayarkannya. Demikian juga halnya dengan subjek pajak daerah, bahwa wajib pajak di daerah juga kurang bisa berlaku jujur dalam melakukan kewajiban membayar pajak.

Di sini terlihat bahwa pemasukan kas daerah memang sangat tergantung dari sektor pajak, karena sektor pajak memang pendapatan asli daerah yang dapat mendukung pembangunan di daerah. Apabila wajib pajak di daerah tidak dapat melakukan kewajibannya untuk membayar pajak maka pemasukan daerah dari sektor pajak akan menurun, dan pada akhirnya dapat menghambat pembangunan di daerah.

Namun untuk pemilik restoran, terlihat mereka sudah memahami tentang arti penting pembayaran pajak tersebut, hal ini terlihat dari kecilnya persentase yang menunggak dalam pembayaran pajaknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mereka memahami tentang pajak restoran tersebut.

Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Suyanto, bahwa ia tidak ada keberatan terhadap pembayaran pajak restoran tersebut, demikian juga halnya

dengan besaran pajak yang harus dibayarkan, karena pajak yang dibayarkan tersebut dibebankan kepada pembeli atau konsumen dengan menambah 10 (sepuluh) persen dari total jumlah harga makanan atau minuman yang dipesan oleh pembeli. Dengan demikian tidak ada dampaknya terhadap penghasilan yang diperoleh oleh pemilik restoran.⁴⁷

Oleh karena itu setiap wajib pajak di daerah apapun bentuk kewajiban tersebut memang harus meningkatkan kesadarannya dalam melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

3. Kurangnya sosialisasi dari instansi terkait

Salah satu kendala yang mempengaruhi dalam pemungutan pajak daerah adalah kurangnya pemahaman subjek pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait dalam menghimbau masyarakat yang mempunyai kewajiban membayar pajak. Pajak yang dibayarkan berhubungan dengan usaha atau kegiatan yang dilakukannya di suatu daerah atau tempat tertentu.

Sosialisasi dari instansi terkait yang berhubungan dengan kewajiban subjek pajak untuk membayar pajaknya adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam rangka untuk memberikan perhatian dan pemahaman kepada masyarakat secara keseluruhan untuk melakukan pembayaran pajak.

Berbagai jenis pajak daerah merupakan pemasukan daerah untuk menunjang pembangunan di daerah. Oleh karena itu memang sangat diperlukan

⁴⁷Rudi (pemilik Rumah Makan C.F.C), *Wawancara*, 19 Januari 2013

kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti pentingnya membayar pajak, karena pajak yang dibayar tersebut secara tidak langsung juga dirasakan kembali oleh subjek pajak, namun tidak dalam bentuk pribadi tetapi dalam bentuk pembangunan sarana umum yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak.

Dengan demikian maka kesadaran membayar pajak tersebut memang harus diketahui oleh masyarakat dengan cara sosialisasi atau pemberitahuan dari instansi yang terkait di daerah, misalnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor dan sebagainya.

B. Pelanggaran dalam Pembayaran Pajak Restoran Menurut Perda Nomor 24 Tahun 2010

Berkenaan dengan kewajiban membayar pajak restoran bagi pengelola dan pemilik rumah makan atau restoran, tentunya tidak semudah apa yang dibayangkan berbagai hal atau kejadian dapat ditemukan di lapangan oleh pihak pemungut, dalam hal ini tentunya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Bentuk kejadian yang dihadapi adalah adanya berbagai pelanggaran dalam pembayaran pajak restoran tersebut, yakni dimulai dari keterlambatan sampai dengan tunggakan dan sebagainya. Oleh karena itu berbagai cara dan solusi harus ditawarkan kepada wajib pajak dalam hal memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Membayar Pajak yang Tidak Sesuai dengan Surat Tagihan

Sebagaimana ungkapan yang diberikan oleh Ibu Ita selaku Staf pada UPT Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan, bahwa pihak Dispenda senantiasa memberikan toleransi kepada wajib pajak restoran dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, yakni dengan mengangsur pajak yang terutang tersebut.⁴⁸

Membayar pajak yang tidak sesuai dengan surat tagihan, sebagaimana dilakukan oleh Rumah Makan Purworejo, yang hanya membayar sebagian dari jumlah tagihan. Namun oleh Dispenda diberi kesempatan untuk membayar secara angsuran dari pajak yang terhutang tersebut.⁴⁹

Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Perda Nomor 24 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa: “Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua) persen sertiap bulan.

Kemudian bagi wajib pajak yang membayar tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam surat tagihan pajak daerah, dan bahkan ada juga di antara wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran dalam masa tahun pajak yang sedang berjalan. Dalam hal ini Bupati melalui instansi terkait yakni Dinas

⁴⁸Ita (Staf UPT Dispenda Kab.Inhil), *Wawancara*, 25 Januari 2013

⁴⁹*Ibid.*

Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).⁵⁰

Sebagaimana yang diungkapkan oleh M.Ruis staf Bidang Pajak pada Dinspenda Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa bagi wajib pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dalam melakukan pembayaran maka pihak pemerintah daerah melalui Dispenda mengeluarkan surat tagihan pajak daerah, dan kepada wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.⁵¹

2. Terlambat Membayar Pajak

Keterlambatan pembayaran atau penyetoran setelah jatuh tempo, baik pembayaran atau setoran masa pajak maupun pembayaran atas penetapan, juga atas Surat Tagihan Pajak (STP) terutang, maka kepada wajib pajak dibebani bunga sebesar 2% (dua) persen per bulan, apabila kurang dari satu bulan maka dianggap satu bulan penuh.⁵²

Demikian juga halnya yang diungkapkan oleh Muji pemilik Rumah Makan Pemuda Semarang yang mengatakan, bahwa ia pernah terlambat melakukan pembayaran pajak sebagaimana yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak, maka ia dikenakan biaya administrasi berupa denda sebesar 2% (dua) persen setiap bulan keterlambatan.⁵³

⁵⁰Pasal 15 ayat (1) huruf a Perda Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

⁵¹M.Ruis (Staf Bidang Pajak pada Dispenda Kab.Inhil), *Wawancara*, 25 Januari 2013

⁵²Uwon Gustiawan. S, *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2007), h.85

⁵³Muji (pemilik Rumah Makan Pemuda Semarang), *Wawancara*, 19 Januari 2013

3. Tidak Membayar Pajak

Bagi wajib pajak yang belum atau tidak melakukan pembayaran terhadap pajak yang terutang, maka Dispenda akan mengeluarkan surat teguran, sebagai awal dari tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.⁵⁴

Setelah dikeluarkan surat teguran kepada wajib pajak, maka wajib pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan, maka wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.⁵⁵

Sebagaimana terjadi pada Rumah Makan Friska, yangmana tagihan pajaknya sudah jatuh tempo tetapi tidak melakukan pembayaran. Tentunya kepada pemilik dikirimkan surat teguran agar segera membayar pajak yang terhutang tersebut.

Sejalan dengan ungkapan tersebut maka dapat dipahami bahwa wajib pajak telah diberi kesempatan untuk melakukan pembayaran dengan tenggang waktu yang tersebut. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila pemerintah daerah memberikan sanksi atas keterlambatan tersebut agar untuk ke depannya wajib pajak tersebut dapat disiplin untuk membayar pajak terutang tersebut sesuai dengan apa yang telah diisi dalam surat pemberitahuan pajak.

Tenggang waktu tersebut merupakan toleransi yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah, agar para wajib pajak

⁵⁴Pasal 16 Perda No.24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

⁵⁵Pohan (Kabid. Pendataan pada Dispenda Kab.Inhil), *Wawancara*, 25 Januari 2013

tersebut dapat mempertimbangkannya dan melakukan persiapan terhadap kewajiban yang harus ia lakukan.

Apabila dalam tenggang waktu tujuh hari tersebut wajib pajak juga tidak melakukan pembayaran, maka pemerintah daerah melalui Dispenda menerbitkan surat paksa, sehubungan dengan wajib pajak tidak melakukan pembayaran berdasarkan surat pemberitahuan pajak atau surat tagihan pajak, tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat paksa tersebut.⁵⁶

Surat paksa tersebut dikeluarkan apabila wajib pajak yang sudah diberi kelonggaran waktu juga tidak dapat melunasi pajak terutang, maka pemerintah daerah harus mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, bahwa wajib pajak dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam harus segera melunasi pajak yang terutang tersebut.

Apabila dalam dua kali dua puluh empat jam tersebut wajib pajak juga tidak melakukan pembayaran, maka jalan yang ditempuh adalah dengan melakukan penyitaan.⁵⁷ Di sini terlihat bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menerapkan disiplin bagi wajib pajak adalah sudah nyata dan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Namun bagi wajib pajak masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap pembayaran pajak restoran tersebut, sebagaimana ungkapan yang diberikan oleh Dedi, yang mengatakan bahwa masih banyak pemilik rumah

⁵⁶Dedi (Staf UPT Dispenda Kab.Inhil), *Wawancara*, 25 Januari 2013

⁵⁷Pasal 18 Perda No.24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

makan yang tidak disiplin dalam melakukan pembayaran pajak, karena alasan sepi dan sebagainya.⁵⁸

Penyitaan yang dilakukan oleh Dispenda adalah penyitaan terhadap asset yang dimiliki oleh pemilik atau pengelola restoran, seperti tanah, rumah dan sebagainya, sesuai dengan besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh pemilik restoran.

Apabila sudah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari, sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk pengajuan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri.⁵⁹

Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Ita salah seorang staf pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang mengatakan bahwa bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sampai batas waktu yang telah ditentukan dan juga sudah diberi peringatan dan sudah pula diberi tenggang waktu, maka sampailah tindakan penyitaan dan pelelangan.⁶⁰

Sehubungan dengan ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, merupakan tindakan yang bertujuan untuk semua wajib pajak agar dapat disiplin membayar pajak yang terutang,

⁵⁸Dedi (Staf UPT Dispenda Kab.Inhil), *Wawancara*, 25 Januari 2013

⁵⁹Pasal 19 Perda Kab.Inhil Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

⁶⁰Ita (Staf UPT Dispenda Kab.Inhil), *Wawancara*, 25 Januari 2013

karena pajak tersebut merupakan pendapatan daerah yang dapat memacu pembangunan daerah sesuai dengan program yang telah direncanakan.

Sanksi yang dapat diberikan kepada setiap wajib pajak, adalah setiap wajib pajak yang sengaja:

1. Tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan, menggunakan tanpa hak NPWP.
2. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).
3. Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
4. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
5. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
6. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
7. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara atau daerah.⁶¹

Sehubungan dengan pelanggaran dalam pembayaran pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, yang terjadi dalam wilayah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang, tidak penyetorkan pajak sebagaimana yang tertuang dalam surat pemberitahuan pajak, serta tidak menyelenggarakan pembukuan yang jelas.

⁶¹Uwon Gustiawan. S, *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2007), h.171

Hal ini juga disampaikan oleh Pohan Kepala Bidang Pendataan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan, bahwa wajib pajak restoran kebanyakan tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak dan tidak menyetorkan pajak yang terutang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu pihak Dinas Pendapatan Daerah senantiasa berupaya untuk mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran terhadap pajak terutang, agar mereka menyadari bahwa pajak tersebut merupakan pemasukan daerah yang dipergunakan untuk pembangunan.⁶²

Dari kenyataan yang ditemui di lapangan tersebut, maka pihak pemungut dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir senantiasa berupaya terus untuk menagih pajak terutang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun cara petugas melakukan penagihan adalah dengan mendatangi wajib pajak, dan mengingatkan wajib pajak agar segera melakukan pembayaran pajak yang terutang tersebut.

Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Suyanto pemilik Rumah Makan Purworejo yang mengatakan, bahwa ia pernah didatangi petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menagih pajak yang terutang yang belum ia bayarkan. Menurut petugas tersebut apabila terlambat melakukan pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 2% (dua) persen pada setiap bulan keterlambatan.⁶³

⁶²Pohan (Kepala Bidang Pendataan pada Dispenda Kab.Inhil), *Wawancara*, 25 Januari 2013

⁶³Suyanto (pemilik Rumah Makan Purworejo), *Wawancara*, 19 Januari 2013

Di sini terlihat bahwa wajib pajak restoran yang ada dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap pembayaran pajak yang terutang. Oleh karena itu jelas keterlambatan tersebut sudah pasti mendapat sanksi yakni berupa denda sebagaimana yang dijelaskan di atas.

C. Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Pembayaran Pajak Restoran

Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap pembayaran pajak restoran yang dilakukan oleh wajib pajak, maka oleh pihak pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan tindakan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa penyelesaian terhadap keterlambatan pembayaran pajak restoran dikenakan denda sebesar 2% (dua) persen pada setiap bulan keterlambatan. Apabila wajib pajak juga tidak melakukan pembayaran maka pihak Dispenda berdasarkan Perda Nomor 24 Tahun 2010.

Selanjutnya pihak Dispenda menyampaikan surat teguran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran tersebut, maka wajib pajak wajib melunasi pajaknya. Apabila dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam wajib pajak tidak juga melunasi hutang pajaknya, maka Bupati melalui Dispenda mengeluarkan surat paksa. Apabila wajib pajak juga tidak melunasi

hutangnya, maka akan dilakukan penyitaan terhadap asset usaha yang dijalankan, yakni berupa rumah, tanah dan sebagainya.

Setelah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah penyitaan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri. Selanjutnya Juru Sita menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, dan memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Hal ini sesuai dengan ungkapan yang diberikan oleh M.Ruis salah seorang staf Bidang Pajak pada Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan, bahwa apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, maka pihak Dispenda akan melakukan pelelangan terhadap aset yang dimiliki oleh wajib pajak sesuai besarnya pajak yang terhutang.⁶⁴

Namun di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir belum pernah sampai kepada pelelangan, penyelesaian yang dilakukan baru sebatas teguran dan wajib pajak segera melakukan pelunasan terhadap pajak yang terhutang yang harus dibayarkannya.

Di sini terlihat bahwa memang sering terjadi keterlambatan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran terhadap pajak yang terhutang, namun kemudian wajib pajak setelah menerima surat teguran langsung melakukan pembayaran sejumlah pajak yang terhutang tersebut. Hal ini sebagaimana yang

⁶⁴ M.Ruis (Staf Bidang Pajak pada Dispenda Kab.Inhil), *Wawancara*, 25 Januari 2013

diungkapkan oleh Ali Uma pemilik Rumah Makan Simpang Tiga yang mengatakan, bahwa ia memang ada terlambat dalam melakukan pembayaran namun setelah surat teguran diterimanya maka ia langsung melakukan pembayaran terhadap pajak yang terhutang yang harus ia bayar.⁶⁵

Terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis apabila wajib pajak telah melakukan pembayaran sejumlah yang tertera dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), maka wajib pajak mengajukan keberatan tersebut kapda Bupati atau pejabat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran yang menyatakan, bahwa: “Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemungutan pajak, kecuali apabila wajib pajak tidak dapat memenuhi jangka waktu yang dimaksud karena keadaan diluar kekuasaannya”.

Berkenaan dengan hal tersebut maka Bupati atau melalui pejabat yang ditunjuk dapat memperbaiki Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis atau kesalahan hitung dan sebagainya.⁶⁶ Di sini terlihat bahwa surat tagihan pajak yang disampaikan oleh Dispenda tersebut juga ada terjadi kesalahan, oleh karena itu kepada wajib pajak diberi waktu

⁶⁵ Ali Uma (pemilik Rumah Makan Simpang Tiga), *Wawancara*, 19 Januari 2013

⁶⁶ Pasal 25 Perda Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

selama 3 (tiga) bulan untuk mengajukan keberatan terhadap jumlah pajak yang terhutang tersebut.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak Surat Keberatan diterima dari wajib pajak, maka harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.⁶⁷ Di sini jelas bahwa wajib pajak juga mempunyai hak untuk mengajukan keberatan karena ia merasa jumlah pajak yang harus dibayar cukup berat karena tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh.

Oleh karena itu Bupati atau instansi terkait harus segera memberikan klarifikasi atas kesalahan tersebut dapat bentuk surat perbaikan atas surat tagihan pajak yang dikirim kepada wajib pajak yang bersangkutan. Berkenaan dengan hal ini, maka pihak pemerintah daerah juga harus memberikan pelayanan yang baik bagi wajib pajak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mina pemilik Rumah Makan Frisca yang mengatakan, bahwa pihak pemerintah daerah melalui Dispenda juga harus memberikan penjelasan dan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak, karena wajib pajak juga ada yang tidak mengerti tentang penghitungan pajak terutang yang harus dibayarkan.⁶⁸

Dengan demikian maka diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam memahami jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu maka pihak pemerintah daerah melalui instansi terkait juga

⁶⁷Pasal 22 ayat (1) Perda Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

⁶⁸Mina (Pemilik Rumah Makan Frisca), *Wawancara*, 19 Januari 2013

mensosialisasikan peraturan daerah yang berhubungan dengan pajak restoran. Apabila hal ini dapat dilakukan maka diharapkan ke depan tidak akan terjadi lagi kekeliruan dalam memahami penghitungan pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menghindari perlawanan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.
- b. Meningkatkan pendidikan masyarakat, sehingga semakin sadar akan manfaat pajak bagi kelangsungan hidup negara atau daerah, dan kelancaran jalannya pembangunan.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak potensial, dengan data dari instansi lain, misalnya Kantor Telepon, PLN, Pasar Modal, dan sebagainya.
- d. Usaha intensifikasi harus terus dilakukan dengan mengadakan penelitian yang serius atas laporan-laporan (Surtat Pemberitahuan) yang masuk, karena usaha penghindaran pajak secara illegal tergantung dari beberapa faktor, antara probabilitas, antara lain probabilitas ketahuan, tariff pajak dan sanksi.
- e. Mengusahakan buku-buku pedoman atau petunjuk pelaksanaan peraturan yang telah ada, sehingga ketentuan-ketentuan perpajakan menjadi lebih pasti.

- f. Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang telah ada secara adil dan merata, baik mengenai pelaksanaannya maupun penerapan sanksi-sanksinya.⁶⁹

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sosialisasi kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam rangka untuk memberikan pemahaman, agar masyarakat mempunyai kesadaran dalam membayar pajak terhadap usaha yang dilakukannya, sebagaimana halnya usaha rumah makan, restoran dan sebagainya.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban dalam membayar pajak daerah, dan dalam rangka untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.⁷⁰

Berkenaan dengan hal itu maka penyelesaian yang dilakukan oleh wajib pajak restoran dengan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui pejabat yang ditunjuk, adalah pada tahap teguran melalui surat yang disampaikan kepada wajib pajak, dan wajib pajak segera melakukan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Jadi dengan demikian penyelesaian pembayaran pajak restoran tersebut lebih kepada memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan memberikan kelonggaran waktu sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

⁶⁹Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta: Universtias Atma Jaya, 2004), h.103

⁷⁰Pasal 31 ayat (1) Perda Kab.Inhil Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perda Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan cara melakukan pemungutan pajak terhadap pemilik rumah makan atau restoran melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), sebesar 10% (sepuluh) persen dari pembayaran yang diterima oleh pemilik rumah makan, berdasarkan Pasal 6 Perda Nomor 24 Tahun 2010. Apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran maka dikenai denda sebesar 2% (dua) persen setiap bulan keterlambatan.
2. Pelanggaran dalam pembayaran pajak restoran di Kabupaten Indragiri Hilir, kebanyakan adalah terlambat atau lalai, di samping itu juga tidak mengisi formulir pembayaran pajak yang telah disampaikan oleh Dispenda. Oleh karena itu pihak Dispenda adakalanya melakukan penagihan langsung ke tempat wajib pajak melalui petugas yang ditunjuk, atau memerintahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran ke kantor pos terdekat atau langsung ke kas daerah pada Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Penyelesaian terhadap pelanggaran pembayaran pajak restoran dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara memberikan surat teguran kepada wajib pajak, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib pajak harus segera melunasi pajak yang terhutang. Penyelesaian terhadap pembayaran pajak restoran ini lebih kepada memberikan kesempatan dengan memberikan tenggang waktu yang dijelaskan dalam Perda, sehingga tidak sampai kepada pemaksaan, dan lebih memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang terhutang tersebut.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir harus benar-benar dapat melaksanakan tugas dalam melakukan pemungutan pajak, dan menggunakan uang pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni untuk kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan.
2. Kepada masyarakat, khususnya wajib pajak harus mempunyai kesadaran sebagai warga negara Indonesia yang baik harus taat dalam membayar pajak sebagai wujud nyata dari penghasilan yang diperoleh melalui izin yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait, maka konsekuensi dari hal tersebut pemilik usaha wajib melakukan pembayaran terhadap pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Atep Adya Barata dan Bambang Trihartanto, *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Riant Nugroho D, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2008
- Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004
- Syahda Guruh Langkah Samudera, *Menimbang Otonomi dan Federal*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000
- Uwon Gustiawan, *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2007
- Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

**DAFTAR PERTANYAAN
UNTUK STAF PADA DISPENDA KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

1. Bagaimana tata cara pemungutan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Berdasarkan apa wajib pajak melakukan pembayaran?
3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak restoran?
4. Bagaimana apabila terjadi keterlambatan?
5. Bagaimana pula apabila pajak yang dibayar tersebut ternyata kurang?
6. Apakah ada teguran bagi wajib pajak yang terlambat atau kurang dalam melakukan pembayaran?
7. Apakah pajak yang terutang dapat terjadi penambahan?
8. Apa bentuk sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan kepada wajib pajak?
9. Apakah wajib pajak melaporkan sendiri kewajiban pajaknya?
10. Apakah ada surat tagihan kepada wajib pajak?
11. Bagaimana tata cara pembayaran dan penagihan terhadap pajak restoran?
12. Bagaimana prosedur keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak?
13. Apakah wajib pajak dapat mengetahui berapa pajak yang harus dibayarkannya?
14. Apabila terjadi penyimpangan, bagaimana cara proses penyidikan atau pemeriksaannya?
15. Bagaimana kalau wajib pajak lalai dalam melakukan pembayaran atau dalam pengisian tidak benar?
16. Bagaimana kalau wajib pajak tidak melakukan pembayaran?

DADFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMILIK RUMAH MAKAN

1. Apakah ada pemberitahuan dari Dispenda kepada Bapak/Ibu tentang kewajiban membayar pajak restoran?
2. Berdasarkan apa wajib pajak melakukan pembayaran?
3. Bagaimana cara melakukan pembayaran pajak restoran?
4. Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah terlambat membayar pajak restoran?
6. Apakah ada teguran dari Dispenda terhadap Bapak/Ibu?
7. Apakah ada sanksi yang dikenakan kepada Bapak/Ibu yang terlambat membayar pajak?
8. Apakah Bapak/Ibu dikenakan denda terhadap keterlambatan membayar pajak restoran?
9. Apakah Bapak/Ibu diberi kesempatan oleh Dispenda untuk mengajukan keberatan?
10. Apakah Bapak/Ibu ada dipanggil ke Dispenda untuk memberikan keterangan?
11. Bagaimana menurut Bapak/Ibu cara penyelesaian terhadap keterlambatan membayar pajak restoran?
12. Apakah Bapak/Ibu merasa puas terhadap penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Pemda?

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, Ibunda Siti Munah dan Ayahanda Marjuni, kakanda M. Zaini, serta Paman dan Bibi, yang selalu Memotivasi, Mendoakan dan Membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. HM. Nazir, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd, Dekan fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH.MH, dan sekretaris jurusan Bapak Maghfirah, M.Ag, staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Darwis, S.HI. MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu para Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak H. Azwar Aziz, SH. Msi selaku penasehat akademik yang telah memberi dorongan moril dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak /Ibu dosen yang telah mendidikan dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
9. Kepada kekasih tersayang Siti Sani yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua sahabat-sahabatku, Fariz Wijdan, SH, Febriansyah, SH, Rohmat Juanda, SH, Dani, Megi Erizolina, SH, Indra Wahyudi, Riswanda yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada Kakanda Ivan Febriawan dan Kak Mimi yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Buat seluruh teman-teman jurusan Ilmu Hukum angkatan 2008 Khususnya teman-teman IH 1 yang telah ikut membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Maret 2013

ASEP SYAFRUDDIN
108 2700 2683